



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2023

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 130);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Rancangan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2023.
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam hal terdapat perintah perundang-undangan atau keadaan mendesak untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembentukan Peraturan Bupati di luar program pembentukan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Penyiapan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengusul/pengampu.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI BANTUL,
ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2023

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2023

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
1	Tata Cara Pembagian Dana Desa Setiap Kalurahan	Besaran Dana Desa Setiap Kalurahan	Bagian Hukum, BPKPAD, Inspektorat Daerah, DPMK	UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendes Nomor 8 Tahun 2022
2	Tata Cara Pembagian Lokasi Dana Desa Setiap Kalurahan	Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Kalurahan	Bagian Hukum, BPKPAD, Inspektorat Daerah, DPMK	UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
3	Tata Cara Pembagian Dana Kompensasi Tanah Kas Kalurahan	Besaran Dana Kompensasi Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk kepentingan umum	Bagian Hukum, BPKPAD, Inspektorat Daerah, DPMK	Pergub DIY Nomor 34 Tahun 2017
4	Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan	Cara Penganggaran dan Sinkronisasi Kegiatan	Bagian Hukum, BPKPAD, Inspektorat Daerah, DPMK	UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
5	Tata Cara Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi	Besaran Hasil Pajak dan Retribusi Setiap Kalurahan	Bagian Hukum, BPKPAD, Inspektorat Daerah, DKUKMPP, Dinas Pariwisata, DKPP, DPMK	UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
6	Pedoman Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah	Perubahan Perbup Nomor 2 Tahun 2015	DPMK	Permendagri Nomor 18 Tahun 2011
7	Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa	Jenis-jenis kerja sama antar desa	Bagian Hukum, DPMK, Bagian Tata Pemerintahan, Inspektorat Daerah, Kapanewon	Permendagri Nomor 96 Tahun 2017
8	Perencanaan Pembangunan Kalurahan	Penyusunan RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan	Bappeda, DPMK, Bagian Hukum	Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 dan Permendes Nomor 21 Tahun 2020
9	Pedoman Standar Honor Tim Pengisian Bamuskal, Pengisian Pamong Kalurahan, Tim Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan	Besaran Honor Tim	DPMK, Bagian Hukum, Inspektorat Daerah	Perda Nomor 5 Tahun 2020 dan Perda Nomor 8 Tahun 2020
10	Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023	Pemberian tambahan penghasilan kepada P3K di Lingkungan DKPP Kabupaten Bantul sebesar Rp500.000,00 setiap bulan selama 12 terhitung mulai bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023	DKPP, Bappeda, Inspektorat Daerah, BPKPAD	UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 49 Tahun 2018; Perda Nomor 11 Tahun 2021; Perbup Nomor 155 Tahun 2021

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
11	Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Bantul	Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	DKPP, Bappeda, Inspektorat Daerah	UU Nomor 18 Tahun 2022; PP Nomor 17 Tahun 2015; Perda Nomor 4 Tahun 2018; Pergub Nomor 115 Tahun 2018
12	Penyesuaian Tarif Retribusi dan Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pertanian pada Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Kenaikan Harga benih Padi	DKPP; Bappeda; BP3MBTP; BPKPAD	PP Nomor 74 Tahun 2012; Perda Nomor 6 Tahun 2021; Perbup Nomor 165 Tahun 2021; Perbup Nomor 11 Tahun 2018
13	Pola Tata Kelola Balai Benih Pertanian Barongan	Tata kelola BLUD Balai Benih Pertanian Barongan	DKPP, Bappeda, BP3MBTP	PP nomor 74 Tahun 2012; Perda Nomor 6 Tahun 2021; Perbup Nomor 165 Tahun 2021
14	Rencana Strategis Balai Benih Pertanian Barongan	Renstra BLUD Balai Benih Pertanian Barongan	DKPP, Bappeda, BP3MBTP	PP nomor 74 Tahun 2012; Perda Nomor 6 Tahun 2021; Perbup Nomor 165 Tahun 2021
15	Penerapan Standar Pelayanan Minimal Balai Benih Pertanian Barongan	Penerapan standar pelayanan minimal	DKPP, Bappeda, BP3MBTP	PP Nomor 74 Tahun 2012; Perda Nomor 6 Tahun 2021; Perbup Nomor 165 Tahun 2021
16	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 28A Tahun 2011 tentang Perizinan di Bidang Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Mengatur terkait perizinan tenaga medik veteriner, tenaga paramedic veteriner (Keswan, Inseminator, PKB, ATR), Pembukaan klinik/rumah sakit hewan	DKPP, DPMPTSP	UU nomor 41 Tahun 2014; PP Nomor 3 Tahun 2017; Permentan Nomor 64 Tahun 2007; Permentan Nomor 3 Tahun 2019

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
17	Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Bantul	Penambahan dan perubahan pasal yang ada dalam Peraturan Bupati	Bagian Hukum, Bagian Kesra	Perda Kabupaten Bantul
18	Pedoman Pembayaran Gaji Aparat Sipil Negara Melalui Aplikasi SIM Gaji di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul	jenis, pembayaran, syarat pengajuan dan pengambilan gaji	BPKPAD, BKPSDM, Inspektorat Daerah, Bagian hukum, Bagian Organisasi	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
19	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tetnang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun 2023	Mengatur perubahan standar harga	Bagian Hukum	Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
20	Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024	Mengatur tentang standar harga barang dan jasa	Bagian Hukum, BPKPAD	Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
21	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	Bagian Hukum, BPKPAD	PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
22	Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Perubahan atas Perbup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023	Bagian Hukum, BPKPAD	PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
23	Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Perubahan atas Perbup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023	Bagian Hukum, BPKPAD	PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
24	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024	Bagian Hukum, BPKPAD	PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
25	Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah	Pedoman pelaksanaan keuangan daerah	Bagian Hukum, BPKPAD	PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
26	Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Pedoman penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam pembayaran belanja daerah melalui mekanisme Uang Persediaan	BPKPAD, Bagian Hukum	Permendagri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit dalam pelaksanaan APBD

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
27	Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Mengatur tentang Objek Pajak, Subjek Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak PBB-P2	BPKPAD, Bagian Hukum	UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
28	Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	mengatur tentang Objek Pajak, Subjek Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif, cara perhitungan, pengenaan dan saat terutangnya BPHTB	BPKPAD, Bagian Hukum	UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
29	Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu	Mengatur tentang Objek Pajak, Subjek Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif, Cara Perhitungan, dan Pengenaan Pajak PBJT	BPKPAD, Bagian Hukum	UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
30	Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame	Mengatur tentang Objek Pajak, Subjek Pajak, Dasar pengenaan pajak, tarif, dan cara perhitungan dan pengenaan pajak reklame	BPKPAD, Bagian Hukum	UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
31	Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah	Mengatur tentang Objek Pajak, Subjek Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif, Cara Perhitungan dan Pengenaan PAT	BPKPAD, Bagian Hukum	UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
32	Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	Mengatur tentang Objek Pajak, Subjek Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif, Cara Perhitungan dan Pengenaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	BPKPAD, Bagian Hukum	UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
33	Tata Cara Pemungutan Pajak Burung Walet	Mengatur tentang Objek Pajak, Subjek Pajak, Dasar Pengenaan Pajak, Tarif, Cara Perhitungan dan Pengenaan Pajak Burung Walet	BPKPAD, Bagian Hukum	UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
34	Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor	Mengatur tentang Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara perhitungan Opsen PKB	BPKPAD, Bagian Hukum	UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
35	Tata cara Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Mengatur tentang Dasar Pengenaan, Tarif dan cara perhitungan Opsen BBNKB	BPKPAD, Bagian Hukum	UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
36	Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah	Mengatur tentang dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan insentif pemungutan pajak daerah	BPKPAD, Bagian Hukum	UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
37	Tata Cara Pendaftaran Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan	Mengatur tentang syarat dan prosedur pendaftaran objek PBB Perdesaan dan Perkotaan	BPKPAD, Bagian Hukum	UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
38	Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah	Mengatur tentang prosedur pemeriksaan pajak daerah	BPKPAD, Bagian Hukum	UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
39	Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah	Mengatur tentang prosedur penghapusan piutang pajak daerah	BPKPAD, Bagian Hukum	UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
40	Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Mengatur tentang syarat dan prosedur pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	BPKPAD, Bagian Hukum	UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
41	Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Mengatur tentang batas waktu, tempat dan prosedur pembayaran serta penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	BPKPAD, Bagian Hukum	UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
42	Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Mengatur tentang syarat dan prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	BPKPAD, Bagian Hukum	UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
43	Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah untuk Setiap Desa	Mengatur tentang dasar perhitungan, syarat dan prosedur pengalokasian Bagi hasil Pajak Daerah untuk Desa	BPKPAD, DPMK, Bagian Hukum	UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
44	Sistem Monitoring dan Pelaporan Pajak Daerah Secara Online	Mengatur tentang tata cara pelaporan dan monitoring Pajak Daerah secara online	BPKPAD, Bagian Hukum	UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
45	Tata Cara Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Mengatur tentang syarat dan prosedur pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	BPKPAD, Bagian Hukum	UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
46	Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Mengatur tentang ketentuan dan tata cara klasifikasi dan penetapan nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan	BPKPAD, Bagian Hukum	UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
47	Tata Cara Pengelolaan Piutang Pajak Daerah	Mengatur tentang tata cara pengadministrasian, pengakuan dan pencatatan piutang pajak daerah	BPKPAD, Bagian Hukum	UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
48	Tata Cara Penagihan Pajak Daerah	Mengatur tentang ketentuan dan tata cara penagihan pajak daerah	BPKPAD, Bagian Hukum	UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
49	Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Mengatur tentang tata cara penomoran Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	BPKPAD, Bagian Hukum	UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
50	Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	Mengatur mengenai pendelegasian penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, ketentuan mengenai perizinan nonberusaha, tata cara pengenaan sanksi administratif, pengelolaan pengaduan masyarakat, dan pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS	DPUPKP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Bagian Hukum, Bagian PPSDA	Perda Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
51	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha	Perubahan jumlah kewenangan perizinan yang dilimpahkan ke DPMPTSP	DPUPKP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Kebudayaan, DKPP, Dinas Kesehatan, Dikpora, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Bappeda, Bagian Hukum, Bagian PPSDA	Perbup Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha
52	Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan	Penataan, pembinaan, dan pengawasan toko swalayan dan pusat perbelanjaan	DPMPTSP, Dispertaru, DPUPKP, Bagian Hukum, Bagian PPSDA	Perda tentang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan
53	Penataan Gudang	Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Gudang	DPMPTSP, Dispertaru, DPUPKP, Bagian Hukum, Bagian PPSDA	Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perizinan Bidang Perindustrian dan Perdagangan
54	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Waralaba	DPMPTSP, Bagian Hukum, Bagian PPSDA	Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perizinan Bidang Perindustrian dan Perdagangan

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
55	Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi	Mengatur mengenai kemudahan, perlindungan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat	Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Perekonomian Daerah	PP Nomor 7 Tahun 2021
56	Pengelolaan Pasar Rakyat	Mengatur pengelompokkan pasar rakyat, sarana dan prasarana, teknis pengelolaan pasart rakyat, dan teknis pemanfaatan pasar rakyat	BPKPAD, Bagian Hukum, Bagian PPSDA, Satpol PP, Dinas Kesehatan dan BPOM	Perda Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat
57	Penyerahan Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan	Tata cara penyerahan dan pengelolaan prasarana dan sarana utilitas perumahan	DPUPKP, BPN, Dispertaru, BPKPAD, Bappeda	Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan
58	Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul	Pemberian kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berupa bantuan stimulan rumah swadaya.	DPUPKP	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
59	Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak	Penyesuaian Perbup Nomor 4 Tahun 2017 dengan peraturan perundang-undangan terbaru	Dinas Sosial, Bagian Kesra	Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
60	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak	Pengaturan lebih lanjut amanat/delegasi Perda Nomor 4 Tahun 2022	Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Dikpora, DPMK, Satpol PP, Badan Kesbangpol, Dinas Kominfo, Dispusip, Dinas Perhubungan, DPUPKP, DLH, BPBD, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesra	Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak
61	Pencegahan dan Penanganan Pornografi pada Anak	Upaya pencegahan pornografi, informasi layak anak, tindakan penanganan pornografi, peran orang tua/masyarakat/pemerintah dalam pencegahan pornografi pada anak	Dinas kominfo, Dispusip, Satpol PP, DPMK	PP Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Anak
62	Tata Cara Pengelolaan Data dan Informasi Perlindungan Anak	Mekanisme pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan data dan informasi perlindungan anak	Dinas Sosial, Dinas Kominfo, Bappeda, Dikpora, Disdukcapil, Badan Kesbangpol	Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
63	Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Melaksanakan Perda tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, Bagian Hukum, Bagian Kesra	Perda P4GN

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
64	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024	RKPD sebagai pedoman dan landasan penyusunan untuk penyusunan dokumen dan kebijakan dan sistematika RKPD	Seluruh Perangkat Daerah	
65	Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024	Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah, Sistematika Renja Perangkat Daerah, dan Daftar Perangkat Daerah yang menyusun Renja Perangkat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	
66	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023	Dasar hukum penyusunan RKPD, RKPD sebagai pedoman dan landasan penyusunan dokumen dan kebijakan, Sistematika Perubahan RKPD	Seluruh Perangkat Daerah	
67	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023	Dasar hukum penyusunan perubahan rencana kerja perangkat daerah, sistematika perubahan rencana kerja perangkat daerah, daftar perangkat daerah yang menyusun perubahan renja	Seluruh Perangkat Daerah	
68	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pedoman Pelaksanaan Penilaian Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	-

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
69	Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata di Kabupaten Bantul	Pedoman Pelaksanaan KKN di Kabupaten Bantul	Seluruh Perangkat Daerah	
70	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bantul	Pengendalian pemanfaatan ruang (penilaian KKPR dan pernyataan mandiri UMK, penilaian rencana perwujudan tata ruang, pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi, penyelesaian sengketa penataan ruang) dan pengawasan pemanfaatan ruang (pemantauan, evaluasi dan pelaporan)	DPTR, Bappeda, DPUPKP, DPMPTSP, DKPP, Satpol PP	UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 21 Tahun 2021, Permen ATR BPN Nomor 21 Tahun 2021, Perda Nomor 4 Tahun 2021, Perda Nomor 9 Tahun 2017
71	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kabupaten Bantul	Tujuan penataan wilayah perencanaan, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi	DPTR, Bappeda, DKPP, BPBD, DPUPKP, DPMPTSP, DLH	UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 21 Tahun 2021, Perda Nomor 4 Tahun 2011
72	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pantai Selatan Kabupaten Bantul	Tujuan pemetaan wilayah perencanaan, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang peraturan zonasi	DPTR, Bappeda, DKPP, BPBD, DPUPKP, DPMPTSP, DLH	UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 21 Tahun 2021, Perda Nomor 4 Tahun 2011

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
73	Sempadan	Ketentuan umum terkait garis sempadan pagar, garis sempadan bangunan terhadap sungai, pantai, jalan, rel KA, mata air/embung/situ, irigasi, cagar budaya, SUTET, pipa minyak/gas, sanksi administratif, pengendalian dan pengawasan	DPUPKP, DLH, Dishub, DKP, Dinas Kebudayaan	UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2007, UU Nomor 22 Tahun 2009, UU Nomor 30 Tahun 2009, UU Nomor 11 Tahun 2010, Perpres Nomor 51 Tahun 2016, Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015, Permen PUPR Nomor 08/PRT/M/2015 Tahun 2015, Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019, Perda Bantul Nomor 4 Tahun 2011, Perda Bantul Nomor 5 Tahun 2011, Perbup Nomor 35 Tahun 2011
74	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Karangkitri Kabupaten Bantul	Program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, pedoman pengendalian pelaksanaan	DPTR, Bappeda, Disbud, BPBD, DPUPKP, Dishub, DLH, Kapanewon	UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 11 Tahun 2020, UU Nomor 28 Tahun 2002, PP Nomor 36 Tahun 2005, PP Nomor 21 Tahun 2021, Permen PUPR Nomor 06/PRT/M/2007 Tahun 2007, Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011, Perda Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2018
75	Forum Pengurangan Risiko Bencana	Struktur, kedudukan dan fungsi	BPBD	-
76	Daerah Rawan Bencana	Penetapan Daerah Rawan Bencana	BPBD	Perda Nomor 22 Tahun 2015

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
77	Rencana Kontinjensi Tsunami	Rencana KontinjensiTsunami	BPBD	-
78	Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	BPBD	-
79	Santunan bagi Korban Bencana	Santunan bagi korban bencana	BPBD	Perda Nomor 22 Tahun 2015
80	Pendidikan Formal Terintegrasi	Satuan Pendidikan aman bencana	BPBD	Perda Nomor 22 Tahun 2015
81	Perbup tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	BPBD	Perda Nomor 22 Tahun 2015
82	Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga kerja Asing	Alur dari pembayaran DKPTKA	Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Bagian Hukum, Disnakertrans	Perda tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perda tentang Ketenagakerjaan
83	Penempatan Tenaga Kerja	Mekanisme penempatan tenaga kerja	Disnakertrans, Bagian Hukum	Perda Kabupaten Bantul tentang Ketenagakerjaan
84	Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara	Kode etik dan perilaku, berakhlak	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BPKPAD, BKPSDM, Inspektorat Daerah	UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 42 Tahun 2004
85	Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul	Disiplin PPPK, perkawinan dan perceraian PPPK	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BPKPAD, BKPSDM, Inspektorat Daerah	PP 49 Tahun 2018
86	Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara	Penyusunan SKP	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BPKPAD, BKPSDM, Inspektorat Daerah	UU Nomor 5 Tahun 2014, Permenpan Nomor 6 Tahun 2022

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
87	Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul	Pengelolaan keuangan dengan pola BLUD	RSUD Saras Adyatma	Permendagri Nomor 79 Tahun 2018
88	Manajemen Talenta	Manajemen Karir PND	bagian Organisasi, Bagian Hukum, BKPSDM	Permenpan Nomor 3 Tahun 2020
89	Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Pengembangan karir PNS	bagian Organisasi, Bagian Hukum, BKPSDM	Perka BKN Nomor 28 Tahun 2020
90	Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara	Penyusunan rencana formasi, pelaksanaan pengadaan dan pengangkatan CASN	BKPSDM, BPKPAD, Bappeda, Diskominfo, Bagian Organisasi, Bagian Hukum	UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 11 Tahun 2017, PP Nomor 49 Tahun 2018
91	Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Pemberdayaan masyarakat melalui perpustakaan daerah	Bappeda, Dispusip, DPMK, DP3APPKB, Dikpora, Dinas Sosial, Bagian Kesra, Kapanewon	Perda Nomor 21 Tahun 2015
92	Ruang Bermain Ramah Anak	Maksud dan tujuan RBRA, Kedudukan tugas dan fungsi RBRA, Pendirian dan pengelolaan RBRA, serta Larangan, evaluasi dan pembiayaan RBRA	Bappeda, DP3APPKB, DPMK, DLH, DPUPKP, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, DKUKMPP, Disnakertrans, Bagian Kesra, Kapanewon	Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak
93	Sekolah Ramah Anak	Maksud dan tujuan SRA, Kedudukan tugas dan fungsi SRA, Pendirian dan pengelolaan SRA, serta Larangan, evaluasi dan pembiayaan SRA	Bappeda, DP3APPKB, Dikpora, Balai Dikmen Kab Bantul, DLH, Bagian Kesra, Kapanewon	Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
94	Pesantren Ramah Anak	Maksud dan tujuan Pesantren RA, Kedudukan tugas dan fungsi Pesantren RA, Pengembangan dan pengelolaan Pesantren RA, serta monitoring, evaluasi dan pembiayaan Pesantren RA	Bappeda, DP3APPKB, Dikpora, Kemenag Bantul, DLH, Bagian Kesra, Kapanewon	Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak
95	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah	Melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah	Bagian Kesra, Bagian Hukum	Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2018
96	Pelaksanaan dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten Bantul	Implementasi sistem manajemen keamanan informasi	Seluruh Perangkat Daerah	UU Nomor 27 Tahun 2022, Perpres Nomor 82 Tahun 2022, Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020, Perka BSSN Nomor 10 Tahun 2019, Perka BSSN Nomor 8 Tahun 2020, Perka BSSN Nomor 4 Tahun 2021
97	Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Pertama/Madrasah Tsanawiyah	Aturan Pelaksanaan PPDB	Bagian Hukum, Dikpora, BPKPAD	Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
98	Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta Tahun 2023	Petunjuk teknis penggunaan dana BOSDA	Bagian Hukum, Dikpora, BPKPAD	Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
99	Program sekolah penggerak dan implementasi kurikulum merdeka pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama	Program sekolah penggerak dan pelaksanaan/implementasi Kurikulum Merdeka	Bagian Hukum, Dikpora	Keputusan Mendikbudristek Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak dan Keputusan Mendikbudristek Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Mendikbudristek Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran
100	Implementasi Sistem Aplikasi E-Moneter	Penerapan sistem aplikasi E-Moneter	Bagian Hukum, Dinas Kominfo	Permendikbudristek Nomor 8 Tahun 2022 tentang SPBE di Lingkungan Kemendikbudristek
101	Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak	Pengelolaan Sekolah Ramah Anak	Bagian Hukum, DP3APPKB	Perda Kab. Bantul No 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
102	Pembentukan Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Penilik, Pamong Belajar, dan Guru Taman Kanak Kanak, Guru sekolah Dasar, Guru Sekolah Menengah Pertama Tahun 2023	Ketugasan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Penilik dan Pengawas	Bagian Hukum, BPKPAD	Permendikbud No 12,14,16 Tahun 2016
103	Pedoman Pemberian TambahanPenghasilan Bagi Kepala Taman Kanak Kanak Negeri, Kepala Sekolah Dasar Negeri, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan, dan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang Tidak Menerima Tunjangan Profesi pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023	Tujuan dan Penerima Tambahan Penghasilan	Bagian Hukum, BPKPAD	Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2022
104	Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tidak Tetap Yayasan di Kabupaten Bantul	Maksud,Tujuan dan Kriteria Penerima Insentif	Bagian Hukum, BPKPAD	Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2021

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
105	Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah	Pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD	Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian PPSDA	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020
106	Pedoman Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	Pedoman bagi BUMD dan BLUD dalam penyampaian laporan, data dan dokumen BUMD dan BLUD	BPKPAD, Dinas Kesehatan, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian PPSDA	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
107	Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha	Pendelegasian Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten	Bappeda, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Dinas PUPKP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertaru, Dikpora, DKPP, DKP, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Bagian Hukum, Bagian PPSDA	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021
108	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	Pengelolaan pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi	Bappeda, BPKPAD, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Dinas PUPKP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertaru, Disdukcapil, Disnakertrans, Dikpora, DKPP, DKP, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Bagian Hukum, Bagian PPSDA	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2014

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
109	Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Tata cara pemungutan, pembayaran, dan penagihan serta tata cara pemberian keringanan/pengurangan dan pembebasan retribusi dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian	Dishub, DPUPKP, DKUKMPP, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata	Perda Nomor 9 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 9 Tahun 2011
110	Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Kalurahan di Kabupaten Bantul	Persyaratan dan Tata Cara Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kalurahan	Kalurahan	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
111	Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Bantul dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampai sejenis sampah rumah tangga serta program kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	DLH, Bagian Hukum, Bappeda, DPUPKP	Perpres Nomor 97 Tahun 2017
112	Pakaian Dinas Pegawai	Pakaian dinas pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BKPSDM	-

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
113	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah	SOTK Setda	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BKPSDM, Bappeda, BPKPAD dan 8 Bagian	Permenpan Nomor 7 Tahun 2022
114	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	SOTK Setwan	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BPKPSDM, Bappeda, BPKPAD dan Setwan	Permenpan Nomor 7 Tahun 2022
115	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja	SOTK Satpol PP	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BKPSDM, BPKPad, dan Satpol PP	Permenpan Nomor 7 Tahun 2022
116	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah	SOTK Inspektorat Daerah	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BKPSDM, BPKPAD, dan Inspektorat Daerah	Permenpan Nomor 7 Tahun 2022
117	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	SOTK Bappeda	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BKPSDM, BPKPAD, dan Bappeda	Permenpan Nomor 7 Tahun 2022
118	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	SOTK BPKPAD	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BKPSDM, BPKPAD, Bappeda	Permenpan Nomor 7 Tahun 2022
119	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	SOTK BKPSDM	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BKPSDM, Bappeda, dan BPKPAD	Permenpan Nomor 7 Tahun 2022

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
120	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	SOTK Badan Kesbangpol	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BKPSDM, Bappeda, BPKPAD dan Badan Kesbangpol	Permenpan Nomor 7 Tahun 2022
121	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SOTK BPBD	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BKPSDM, Bappeda, BPKPAD dan BPBD	Permenpan Nomor 7 Tahun 2022
122	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	SOTK Dikpora	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BKPSDM, Bappeda, BPKPAD, Dikpora	Permenpan Nomor 7 Tahun 2022
123	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan	SOTK Dinkes	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BKPSDM, Bappeda, BPKPAD Dinkes	Permenpan Nomor 7 Tahun 2022
124	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	SOTK DPUPKP	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BKPSDM, Bappeda, BPKPAD, DPUPKP	Permenpan Nomor 7 Tahun 2022
125	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SOTK Disdukcapil	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BKPSDM, Bappeda, BPKPAD, Disdukcapil	Permenpan Nomor 7 Tahun 2022
126	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	SOTK DKUKMPP	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BKPSDM, Bappeda, BPKPAD, DKUKMPP	Permenpan Nomor 7 Tahun 2022

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
127	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial	SOTK Dinsos	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BKPSDM, Bappeda, BPKPAD, Dinsos	Permenpan Nomor 7 Tahun 2022
128	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	SOTK Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BKPSDM, Bappeda, BPKPAD, Disbud	Permenpan Nomor 7 Tahun 2022
129	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	SOTK Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BKPSDM, Bappeda, BPKPAD, DPTR	Permenpan Nomor 7 Tahun 2022
130	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	SOTK Disnakertrans	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BKPSDM, Bappeda, BPKPAD, Disnakertrans	Permenpan Nomor 7 Tahun 2022
131	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup	SOTK DLH	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BKPSDM, Bappeda, BPKPAD, DLH	Permenpan Nomor 7 Tahun 2022
132	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	SOTK DP3APPKB	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BKPSDM, Bappeda, BPKPAD, DP3APPKB	Permenpan Nomor 7 Tahun 2022
133	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan	SOTK Dishub	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BKPSDM, Bappeda, BPKPAD, Dishub	Permenpan Nomor 7 Tahun 2022

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
134	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika	SOTK Diskominfo	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BKPSDM, Bappeda, BPKPAD, Diskominfo	Permenpan Nomor 7 Tahun 2022
135	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata	SOTK Dinas Pariwisata	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BKPSDM, Bappeda, BPKPAD, Dispar	Permenpan Nomor 7 Tahun 2022
136	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SOTK Dispusip	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BKPSDM, Bappeda, BPKPAD, Dispusip	Permenpan Nomor 7 Tahun 2022
137	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	SOTK DPMK	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BKPSDM, Bappeda, BPKPAD, DPMK	Permenpan Nomor 7 Tahun 2022
138	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	SOTK DKPP	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BKPSDM, Bappeda, BPKPAD, DKPP	Permenpan Nomor 7 Tahun 2022
139	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan	SOTK DKP	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BKPSDM, Bappeda, BPKPAD, DKP	Permenpan Nomor 7 Tahun 2022
140	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon	SOTK Kapanewon	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BKPSDM, Bappeda, BPKPAD, Kapanewon	Permenpan Nomor 7 Tahun 2022

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
141	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Bantul	UPTD di Lingkungan Kabupaten Bantul (8 Peraturan Bupati)	Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BKPSDM, Bappeda, BPKPAD, Dinas Induk/UPTD	Permenpan Nomor 7 Tahun 2022
142	Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul	Peran dan tanggung jawab Perangkat Daerah dalam SAKIP	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Perpres Nomor 29 Tahun 2014
143	Formasi, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja ASN Kabupaten Bantul	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Permenpan Nomor 1 Tahun 2020
144	Hasil Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan	Hasil Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan Kabupaten Bantul	Semua Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	Permenpan Nomor 34 Tahun 2011
145	Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Penyesuaian atau perubahan tarif Retribusi Objek Wisata Kabupaten Bantul	Dinas Pariwisata	-
146	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Tempat Rekreasi dan Pariwisata	Rencana Penggabungan Kawasan Objek Wisata Kabupaten Bantul	Dinas Pariwisata	-
147	<i>Hospital Bylaws</i> Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul	Ketentuan tentang pengelolaan internal Rumah Sakit meliputi administrasi, kelompok profesi tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	Kemenkes RI Nomor HK.01.07/Menkes/1128/2022
148	Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023	Penerima dan mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil- Cukai Hasil Tembakau	Bagian Hukum, Dinsos, Bagian Kesra, Disnakertrans, DKPP, Disdukcapil	Peraturan Gubernur DIY Nomor 69 Tahun 2022

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
149	Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2022 tentang Jaring Pengaman Sosial	Mengubah ketentuan mengenai penerima jaring pengaman sosial	Bagian Hukum, Dinsos, Dinkes, BPKPAD, Bagian Kesra	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
150	Fasilitasi Pelaksanaan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul	Pengaturan mengenai kegiatan reses dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD, Bagian Hukum	Perda Nomor 11 Tahun 2017
151	Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Pakaian di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pedoman mengenai pelaksanaan pengadaan pakaian	Sekretariat DPRD, Bagian Hukum	Perda Nomor 11 Tahun 2018
152	Bantuan Keuangan Khusus	Materi, sebagian besar sama dg PERBUP sebelumnya, menyesuaikan BOP 4% dan regulasi PBJ Desa	Inspektorat Daerah, BPKPAD, Bappeda, DPUPKP, DLH, Dikpora, Bagian Hukum, DPMK	-
153	Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan	Materi, sebagian besar sama dg PERBUP sebelumnya, menyesuaikan BOP 4% dan regulasi PBJ Desa	Inspektorat Daerah, BPKPAD, Bappeda, DPUPKP, DLH, Dikpora, Bagian Hukum, DPMK	-
154	Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan	Materi, sebagian besar sama dg PERBUP sebelumnya, menyesuaikan BOP 4% dan regulasi PBJ Desa serta penyesuaian ruang lingkup	Inspektorat Daerah, BPKPAD, Bappeda, DPUPKP, DLH, Dikpora, Bagian Hukum, DPMK	-

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TINDAK LANJUT DARI PERATURAN
155	Pembangunan Pengelolaan Air Bersih	Materi, sebagian besar sama dg PERBUP sebelumnya, menyesuaikan : BOP 4%, regulasi PBJ Desa	Inspektorat Daerah, BPKPAD, Bappeda, DPUPKP, DLH, Dikpora, Bagian Hukum, DPMK	-
156	TNI Manunggal Membangun Desa - Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Perbup Tahun 2017 dan Materi, sebagian besar sama dg PERBUP sebelumnya, menyesuaikan : BOP 4%, regulasi PBJ Desa	Inspektorat Daerah, BPKPAD, Bappeda, DPUPKP, DLH, Dikpora, Bagian Hukum, DPMK	-
157	Dana Insentif Kalurahan	Materi, sebagian besar sama dg PERBUP sebelumnya, menyesuaikan indikator penilaian DIKAL	Inspektorat Daerah, BPKPAD, Bappeda, DPUPKP, DLH, Dikpora, Bagian Hukum, DPMK	-

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH